



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH PELAYARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAN SATRIA UTAMA**
2. Jabatan : **KETUA MAHKAMAH PELAYARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **172209**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.258.046.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 157.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/279 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.032.767.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 855 m2/279 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.023.174.000
4. Bangunan Seluas 33 m2 di JAKARTA SELATAN , Rp. 170.465.000
5. Bangunan Seluas 5.11 m2 di JAKARTA PUSAT , Rp. 93.800.000
6. Bangunan Seluas 7.68 m2 di JAKARTA SELATAN , Rp. 570.240.000
7. Bangunan Seluas 3 m2 di JAKARTA SELATAN , Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 477.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, CHEVROLET AVEO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 560.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	73.440.213
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.368.486.213
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.368.486.213

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.